

Peran Media Online Lokal dalam Pembentukan Opini Publik melalui Pemberitaan Politik

Agus Srimudin¹, Intan Putri^{2*}, Kemas Umar Jaya Negara³, Novasriady⁴, Mutiara Hikmawati⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Sumatera Selatan

*Corresponding author: intanputri@uss.ac.id

ARTICLE INFO

Submitted:

March 3, 2026

Review:

March 31, 2026

Accepted:

April 21, 2026

Available online:

April 30, 2026

Article Citation (APA):

Srimudin, A., Putri, I., Negara, K., Novasriady, N., & Hikmawati, M. (2026). Peran Media Online Lokal dalam Pembentukan Opini Publik Melalui Pemberitaan Politik. *Jurnal Publisitas*, 12(2), 164-179. <https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i2.688>

DOI: <https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i2.688>

[58/publisitas.v12i2.688](https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i2.688)

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran strategis media online dalam membentuk konstruksi realitas politik di tingkat lokal, khususnya di Kota Palembang. Permasalahan penelitian berfokus pada bagaimana media membingkai isu politik serta implikasinya terhadap pembentukan opini publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pola framing dalam pemberitaan politik media online lokal serta mengidentifikasi kecenderungan representasi politik yang dibangun. Metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan analisis framing model Robert N. Entman terhadap 28 berita politik yang dipilih secara purposif. Analisis dilakukan melalui empat elemen framing, yaitu pendefinisian masalah, penentuan penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media cenderung membingkai politik lokal secara stabilitas-oriented, moderat, dan afirmatif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Politik direpresentasikan sebagai ruang yang kondusif dan terkelola, dengan minim penekanan pada konflik aktor utama maupun kritik substantif. Temuan ini mengonfirmasi bahwa media berperan aktif dalam membentuk opini publik melalui mekanisme seleksi dan penekanan isu secara terstruktur. Dampak penelitian ini bersifat teoritis dan praktis, yakni memperkuat relevansi teori framing dalam kajian komunikasi politik lokal serta memberikan refleksi bagi media dan pemangku kepentingan mengenai pentingnya keberimbangan pemberitaan dalam menjaga kualitas demokrasi lokal.

Kata Kunci: Komunikasi Politik, Opini Publik, Media Online Lokal, Pemberitaan Politik, Framing Media

ABSTRACT

This study is motivated by the strategic role of online media in constructing political reality at the local level, particularly in Palembang City. The research problem focuses on how media frame political issues and the implications of such framing for public opinion formation. This study aims to analyze framing patterns in local online political news coverage and to identify the dominant tendencies in political representation. The research employs a qualitative approach using the framing analysis model of Robert N. Entman on 28 purposively selected political news articles. The analysis is conducted through four framing elements: problem definition, causal interpretation, moral evaluation, and treatment recommendation. The findings indicate that the media tend to frame local politics in a stability-oriented, moderate, and affirmative manner toward local government policies. Politics is represented as a conducive and well-managed sphere, with minimal emphasis on conflicts involving key political actors or substantive criticism of policies. These findings confirm that media actively shape public opinion through structured mechanisms of issue selection and emphasis. The implications of this study are both theoretical and practical, reinforcing the relevance of framing theory in local political communication studies and providing reflection for media practitioners and stakeholders on the importance of balanced reporting in maintaining the quality of local democracy.

Keywords: Political Communication, Public Opinion, Local Online Media, Political News Coverage, Media Framing

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi digital dalam satu dekade terakhir telah membawa perubahan signifikan dalam lanskap komunikasi politik, terutama pada cara informasi diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi oleh masyarakat. Media online kini menjadi sumber utama informasi politik bagi publik, baik pada level nasional maupun lokal. Laporan *Digital News Report* yang disusun oleh Newman et al. (2023) menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat mengakses berita melalui platform daring, termasuk portal berita lokal yang memiliki kedekatan geografis dan kultural dengan audiensnya. Transformasi ini memperkuat posisi media online sebagai aktor sentral dalam membentuk persepsi dan opini publik terhadap realitas politik.

Dalam perspektif Ilmu Komunikasi, media tidak dipandang sebagai saluran netral, melainkan sebagai institusi sosial yang secara aktif mengonstruksi realitas melalui proses seleksi dan penekanan pesan. Littlejohn dan Foss (2017) menjelaskan bahwa komunikasi merupakan proses simbolik yang membentuk realitas sosial, sehingga makna yang diterima khalayak sangat dipengaruhi oleh bagaimana pesan dikemas. Salah satu pendekatan teoretis yang banyak digunakan untuk memahami proses tersebut adalah teori framing. Entman pada tahun 1993 menyatakan bahwa framing bekerja dengan menyeleksi aspek tertentu dari realitas dan membuatnya lebih menonjol dalam teks komunikasi, melalui empat fungsi utama: mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, membuat penilaian moral, dan merekomendasikan penyelesaian. Dalam konteks media digital, proses framing menjadi semakin penting karena kecepatan distribusi informasi dan tingginya intensitas eksposur publik terhadap berita daring.

Sejumlah penelitian dalam sepuluh tahun terakhir menunjukkan bahwa media digital memiliki potensi memperkuat efek framing dalam pembentukan opini publik. Tandoc et al. (2021) menekankan bahwa karakteristik distribusi berita berbasis algoritma dapat memperkuat narasi tertentu melalui paparan berulang. McQuail (2019) juga menegaskan bahwa fungsi korelasi media yakni menginterpretasikan peristiwa dan menghubungkannya dengan kepentingan sosial berkontribusi langsung terhadap pembentukan opini publik. Dalam konteks politik, Stromback dan Esser (2017) melalui perspektif mediatization menjelaskan bahwa logika media memengaruhi tidak hanya cara peristiwa politik diberitakan, tetapi juga cara aktor politik bertindak dan berkomunikasi. Fenomena polarisasi opini dan fragmentasi informasi dalam ruang digital, sebagaimana dikemukakan oleh Cinelli et al. (2021), semakin menegaskan pentingnya kajian terhadap konstruksi pesan media dalam menjaga kualitas demokrasi.

Pada level lokal, urgensi penelitian mengenai framing media online menjadi semakin relevan. Media lokal memiliki kedekatan langsung dengan masyarakat serta berperan dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan pemerintah daerah, aktivitas partai politik, dan dinamika elektoral. Kedekatan ini di satu sisi meningkatkan relevansi informasi, tetapi di sisi lain berpotensi memengaruhi objektivitas dan keseimbangan pemberitaan. Dalam konteks Kota Palembang, Sumatera Pos merupakan salah satu media daring yang aktif memberitakan isu-isu politik daerah. Sebagai media lokal, konstruksi realitas politik yang disajikan memiliki potensi besar dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap dinamika politik di wilayah tersebut.

Meskipun berbagai studi telah mengkaji framing dalam media nasional, penelitian yang secara spesifik menganalisis framing media online lokal dalam konteks politik daerah masih relatif terbatas. Padahal, kualitas demokrasi lokal sangat bergantung pada tersedianya informasi politik yang akurat, berimbang, dan memberikan ruang deliberasi publik yang sehat. Ketika media menonjolkan aspek tertentu secara dominan, publik berpotensi membentuk persepsi

yang selaras dengan pola framing tersebut. Oleh karena itu, diperlukan kajian empiris untuk memahami bagaimana media online lokal membingkai isu-isu politik dan bagaimana konstruksi tersebut berpotensi memengaruhi opini publik.



Gambar 1. Media Online Lokal Sumatera Pos

Sumber: Data Penelitian, 2026

Berdasarkan rasional tersebut, permasalahan penelitian ini berfokus pada bagaimana framing pemberitaan politik dalam Sumatera Pos dikonstruksi berdasarkan perangkat teori framing sebagaimana dirumuskan oleh Entman pada tahun 1993. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis cara media mendefinisikan masalah politik, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, serta menawarkan rekomendasi penyelesaian dalam teks berita politik. Analisis ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai kecenderungan konstruksi realitas politik lokal yang disajikan kepada publik. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan memperkaya pengembangan kajian komunikasi politik digital, khususnya pada konteks media online lokal. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan refleksi bagi praktisi media dalam meningkatkan kualitas jurnalisme politik yang profesional, berimbang, dan mendukung penguatan demokrasi daerah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memiliki kontribusi akademik, tetapi juga relevansi sosial dalam konteks pembangunan literasi media dan rasionalitas opini publik di tingkat lokal.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain analisis isi kualitatif (*qualitative content analysis*). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan memahami makna, pola konstruksi pesan, serta kecenderungan framing dalam teks berita politik secara mendalam. Creswell dan Creswell (2018) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi dan memahami makna yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Dalam konteks penelitian ini, makna tersebut merujuk pada bagaimana realitas politik lokal dikonstruksi melalui teks berita media online. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yakni menggambarkan secara sistematis pola framing yang muncul dalam pemberitaan politik, kemudian menganalisisnya berdasarkan perangkat teori framing Robert N. Entman. Menurut Schreier (2012) dalam pendekatan analisis isi kualitatif yang masih banyak dirujuk dalam literatur metodologi kontemporer, analisis isi memungkinkan peneliti menginterpretasikan makna teks secara sistematis dengan menggunakan kategori konseptual yang jelas. Teknik ini relevan untuk mengidentifikasi struktur framing dalam teks berita.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilaksanakan pada periode Januari hingga Maret 2025, dengan lokasi penelitian secara virtual pada portal berita daring Sumatera Pos. Pemilihan media ini didasarkan pada pertimbangan bahwa media tersebut merupakan salah satu portal berita lokal yang aktif memberitakan isu-isu politik di Kota Palembang. Fokus penelitian dibatasi pada berita politik yang memuat isu kebijakan pemerintah daerah, aktivitas partai politik, dan dinamika politik lokal.

Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah teks berita politik yang dipublikasikan pada periode tersebut, sedangkan objek penelitian adalah konstruksi framing dalam teks berita. Unit analisis berupa satuan berita utuh (*headline*, *lead*, dan isi berita). Penentuan sampel dilakukan dengan teknik *purposive sampling*, yaitu memilih berita yang secara substantif memuat isu politik lokal sesuai kriteria penelitian. Sugiyono (2019) menjelaskan bahwa *purposive sampling* digunakan dalam penelitian kualitatif ketika peneliti memilih sumber data berdasarkan pertimbangan tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian.

Tahapan Penelitian

Prosedur penelitian dilakukan melalui beberapa tahapan. Pertama, peneliti melakukan penelusuran dan pengumpulan berita politik sesuai periode yang telah ditentukan. Kedua, peneliti melakukan reduksi data dengan menyaring berita berdasarkan kriteria inklusi yang telah ditetapkan. Ketiga, setiap teks berita dianalisis menggunakan perangkat framing Entman, yaitu:

1. Pendefinisian masalah (*define problems*),
2. Penentuan penyebab (*diagnose causes*),
3. Penilaian moral (*make moral judgment*), dan
4. Rekomendasi penyelesaian (*treatment recommendation*).

Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) menjelaskan bahwa analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif melalui proses kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara terus-menerus hingga diperoleh pola yang konsisten.

Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian dalam studi kualitatif adalah peneliti sendiri (*human instrument*). Creswell dan Creswell (2018) menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti berperan sebagai instrumen utama yang mengumpulkan dan menganalisis data secara langsung. Untuk menjaga konsistensi analisis, peneliti menggunakan lembar kategorisasi (*coding sheet*) yang disusun berdasarkan empat perangkat framing Entman. Lembar ini berfungsi sebagai panduan sistematis dalam mengidentifikasi elemen framing dalam setiap berita.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dilakukan melalui beberapa tahapan sistematis. Pertama, peneliti melakukan pengkodean terbuka (*open coding*) terhadap teks berita dengan cara mengidentifikasi unit-unit makna berupa kata, frasa, kalimat, atau paragraf yang relevan dengan elemen framing, seperti definisi masalah, penyebab, penilaian moral, dan rekomendasi penyelesaian. Setiap unit makna kemudian diberi kode awal yang merepresentasikan tema atau isu tertentu. Selanjutnya, dilakukan pengkodean aksial (*axial coding*) dengan mengelompokkan kode-kode awal ke dalam kategori yang memiliki kesamaan makna atau pola tertentu. Pada

tahap ini, peneliti mengembangkan kategori yang lebih terstruktur untuk melihat hubungan antar elemen framing dalam teks berita. Tahap akhir adalah pengkodean selektif (*selective coding*), yaitu mengidentifikasi kategori inti yang paling dominan dan menyusunnya menjadi pola framing yang utuh dalam pemberitaan politik.

Proses pengkodean dan kategorisasi dalam penelitian ini dilakukan secara manual tanpa menggunakan bantuan perangkat lunak analisis kualitatif seperti NVivo atau ATLAS.ti. Peneliti menggunakan tabel matriks analisis dan lembar kerja (*coding sheet*) untuk mencatat, mengelompokkan, dan membandingkan data secara sistematis. Selanjutnya, analisis dilakukan secara komparatif antarberita untuk mengidentifikasi kecenderungan dominan dalam konstruksi pemberitaan politik. Validitas data dijaga melalui teknik triangulasi teori, yaitu membandingkan hasil temuan dengan konsep framing dan literatur komunikasi politik yang relevan. Selain itu, dilakukan audit trail berupa dokumentasi seluruh proses analisis, mulai dari tahap pengkodean hingga penarikan kesimpulan, guna memastikan transparansi dan keterlacakan prosedur penelitian. Dengan pendekatan ini, metode analisis data dirancang untuk menghasilkan gambaran yang sistematis, mendalam, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pola framing dalam pemberitaan politik media online lokal, sehingga mampu menjawab permasalahan penelitian secara komprehensif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini mengkaji secara mendalam sebanyak 28 berita politik yang diterbitkan oleh Sumatera Pos dalam rentang waktu Januari hingga Maret 2025. Pemilihan periode tersebut didasarkan pada intensitas pemberitaan politik daerah yang relatif tinggi, sehingga memungkinkan peneliti memperoleh gambaran yang representatif mengenai pola konstruksi isu politik di tingkat lokal. Fokus kajian diarahkan pada teks berita sebagai unit analisis utama, mencakup judul, lead, serta isi berita secara utuh. Substansi berita yang dianalisis meliputi isi kebijakan pemerintah daerah, aktivitas dan manuver partai politik, serta dinamika yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah di Kota Palembang. Dengan demikian, penelitian ini menempatkan teks media sebagai objek kajian untuk menelusuri bagaimana realitas politik lokal direpresentasikan kepada publik.

Proses analisis dilakukan dengan menggunakan pendekatan teori framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman. Pendekatan ini dipilih karena mampu menjelaskan bagaimana media menyeleksi dan menonjolkan aspek tertentu dari suatu peristiwa politik. Dalam kerangka tersebut, analisis difokuskan pada empat elemen utama framing. Pertama, *define problems*, yaitu cara media mendefinisikan suatu peristiwa atau isu politik sebagai masalah tertentu. Kedua, *diagnose causes*, yakni bagaimana media mengidentifikasi aktor atau faktor yang dipandang sebagai penyebab munculnya persoalan. Ketiga, *make moral judgment*, yang berkaitan dengan penilaian normatif atau evaluasi moral terhadap peristiwa maupun aktor yang diberitakan. Keempat, *treatment recommendation*, yaitu bentuk solusi atau rekomendasi penyelesaian yang secara implisit maupun eksplisit ditawarkan dalam teks berita. Melalui keempat perangkat tersebut, penelitian ini berupaya mengungkap pola konstruksi pemberitaan politik secara sistematis, sehingga dapat dipahami bagaimana media membentuk makna dan arah persepsi publik terhadap dinamika politik lokal. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan teori framing Robert N. Entman, yang meliputi empat perangkat framing:

1. Define Problems

Tahap pertama dalam analisis framing Robert N. Entman adalah mengidentifikasi bagaimana media mendefinisikan suatu peristiwa sebagai “masalah”. Pendefinisian masalah menjadi elemen paling mendasar karena menentukan arah narasi, sudut pandang, serta fokus perhatian pembaca terhadap suatu isu politik. Dalam penelitian ini, analisis terhadap 28 berita politik yang dipublikasikan oleh Sumatera Pos menunjukkan bahwa konstruksi masalah tidak bersifat tunggal, melainkan terbagi ke dalam beberapa pola dominan. Adapun hasil penelitian yang di dapat yaitu Mayoritas berita (42,9%) membingkai isu politik sebagai bagian dari keberhasilan dan stabilitas pemerintahan daerah. Hal ini menunjukkan kecenderungan media dalam memosisikan realitas politik sebagai sesuatu yang terkendali dan progresif. Hal ini menunjukkan kecenderungan membingkai isu politik dalam konteks keberhasilan program serta stabilitas pemerintahan daerah. Pola ini terlihat dari cara peristiwa politik dipresentasikan sebagai bagian dari capaian pembangunan, penguatan tata kelola, maupun konsolidasi kelembagaan yang berjalan sesuai rencana. Isu-isu yang berpotensi dipersepsikan sebagai persoalan publik lebih sering direduksi menjadi tantangan administratif yang sedang ditangani secara sistematis oleh pemerintah. Dengan demikian, fokus pemberitaan tidak diarahkan pada potensi konflik atau ketegangan politik, melainkan pada narasi keberlanjutan dan kemajuan.



Gambar 2. Media Online Lokal Sumatera Pos

Sumber: Data Penelitian, 2026

Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa media memosisikan realitas politik lokal sebagai situasi yang relatif kondusif, stabil, dan terkendali. Stabilitas menjadi bingkai dominan yang menempatkan pemerintah daerah sebagai aktor utama yang responsif dan solutif. Secara implisit, konstruksi ini dapat membangun persepsi publik bahwa dinamika politik yang terjadi merupakan bagian dari proses pembangunan yang wajar dan terkelola dengan baik. Framing semacam ini juga berpotensi memperkuat legitimasi simbolik terhadap kebijakan yang sedang dijalankan, karena isu-isu politik ditampilkan dalam kerangka keberhasilan, bukan problematisasi. Dalam perspektif teori framing, dominasi pendefinisian masalah yang berorientasi pada stabilitas dan keberhasilan memiliki implikasi penting terhadap pembentukan opini publik. Cara suatu isu didefinisikan pada tahap awal akan menentukan arah interpretasi khalayak terhadap keseluruhan peristiwa. Ketika realitas politik secara konsisten direpresentasikan sebagai progresif dan terkendali, maka persepsi kolektif yang terbentuk cenderung selaras dengan narasi tersebut. Dengan kata lain, framing

yang menekankan keberhasilan tidak hanya menggambarkan situasi politik, tetapi juga secara aktif membentuk pemahaman masyarakat mengenai kualitas dan kinerja pemerintahan daerah. Dari 28 berita yang dianalisis, ditemukan pola pendefinisian masalah sebagai berikut:

Tabel 1. Define Problems

Kategori Permasalahan	Jumlah Berita	Persentase
Stabilitas & Keberhasilan Kebijakan Pemerintah	12	42,9%
Kritik terhadap Kebijakan/Program	9	32,1%
Konflik Politik & Dinamika Partai	7	25,0%
Total	28	100%

Sumber: Data Peneltian, 2026

2. *Diagnose Causes*

Sebagian besar berita yang dianalisis, yaitu sebesar 39,3%, mengonstruksi penyebab persoalan pada ranah teknis maupun birokratis, seperti kendala administratif, prosedur yang belum optimal, koordinasi antarlembaga yang kurang efektif, atau keterbatasan sumber daya pelaksana. Dengan pola ini, akar masalah tidak diarahkan pada keputusan strategis atau tanggung jawab langsung aktor politik utama, melainkan pada aspek operasional yang bersifat implementatif. Pilihan framing semacam ini menunjukkan bahwa persoalan diposisikan sebagai hambatan teknis yang dapat diperbaiki melalui penyempurnaan mekanisme kerja, bukan sebagai kegagalan kepemimpinan atau kesalahan kebijakan yang bersifat fundamental. Dari 28 berita yang dianalisis, ditemukan *Diagnose Cause* tergambar dalam table sebagai berikut:

Tabel 2. Diagnose Causes

Aktor Penyebab	Jumlah Berita	Persentase
Faktor Teknis/Birokrasi	11	39,3%
Oposisi/Partai Politik	8	28,6%
Kondisi Sosial-Ekonomi	6	21,4%
Tidak Dijelaskan Secara Tegas	3	10,7%
Total	28	100%

Sumber: Data Peneltian, 2026

Konstruksi penyebab yang berorientasi pada faktor teknis juga cenderung mereduksi potensi konflik politik dalam pemberitaan. Alih-alih menonjolkan dimensi pertentangan atau akuntabilitas personal, berita lebih menekankan pada perlunya evaluasi dan perbaikan sistem. Dalam perspektif framing, strategi ini dapat dipahami sebagai upaya menjaga keseimbangan narasi agar tidak bersifat menyudutkan pihak tertentu. Dengan kata lain, media mengadopsi pendekatan yang relatif moderat, di mana kritik disampaikan dalam batas yang aman dan tetap memberikan ruang klarifikasi bagi pihak yang diberitakan.

Pola framing yang tidak konfrontatif ini berimplikasi pada cara publik memahami dinamika politik lokal. Ketika penyebab masalah secara konsisten diarahkan pada aspek birokratis, maka persepsi yang terbentuk cenderung melihat persoalan sebagai sesuatu yang teknis dan temporer, bukan struktural atau politis. Hal tersebut dapat memperkuat citra stabilitas pemerintahan sekaligus meminimalkan kesan adanya konflik tajam antaraktor politik. Dalam kerangka teori Entman, tahap *diagnose causes* memainkan peran penting dalam menentukan siapa atau apa yang dianggap bertanggung jawab. Oleh karena itu, kecenderungan untuk menempatkan birokrasi sebagai sumber masalah menunjukkan strategi framing yang berorientasi pada stabilitas dan pengelolaan citra institusional.

3. *Make Moral Judgment*

Hampir setengah dari keseluruhan berita yang dianalisis, yakni sebesar 46,4%, memperlihatkan adanya penilaian moral yang cenderung mendukung kebijakan maupun langkah yang diambil oleh pemerintah daerah. Dukungan tersebut tidak selalu disampaikan secara eksplisit dalam bentuk opini redaksional, melainkan hadir melalui pilihan diksi, struktur narasi, serta dominasi kutipan dari sumber resmi pemerintah. Kata-kata seperti “optimalisasi”, “komitmen”, “penguatan”, atau “langkah strategis” menjadi indikator bagaimana evaluasi normatif dibangun dalam teks. Dengan cara ini, pemerintah daerah diposisikan sebagai aktor yang memiliki itikad baik, bertanggung jawab, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Sebaliknya, proporsi berita yang mengandung penilaian moral bersifat kritis relatif kecil, yaitu hanya 17,9%. Kritik yang muncul pun umumnya bersifat terbatas pada aspek teknis atau implementatif, bukan pada legitimasi kebijakan secara mendasar. Dalam banyak kasus, penilaian kritis diimbangi dengan klarifikasi atau tanggapan dari pihak pemerintah, sehingga nuansa evaluatif tetap berada dalam koridor yang moderat. Kondisi ini menunjukkan bahwa framing yang berkembang lebih bersifat afirmatif daripada oposisional, di mana dukungan terhadap kebijakan lebih dominan dibandingkan penonjolan sudut pandang alternatif atau kritik tajam dari pihak luar.

Tabel 3. *Make Moral Judgment*

Pola Penilaian Moral	Jumlah Berita	Persentase
Mendukung Pemerintah	13	46,4%
Netral/Deskriptif	10	35,7%
Kritis	5	17,9%
Total	28	100%

Sumber: Data Penelitian, 2026

Dalam perspektif teori framing Robert N. Entman, tahap *make moral judgment* berperan penting dalam membentuk arah evaluasi publik terhadap suatu isu. Ketika penilaian moral yang dominan cenderung positif terhadap pemerintah, maka persepsi khalayak berpotensi terbentuk sejalan dengan narasi tersebut. Penekanan pada aspek legitimasi dan rasionalitas kebijakan dapat memperkuat citra pemerintah sebagai aktor yang kredibel dan solutif. Pada saat yang sama, terbatasnya porsi kritik dapat mengurangi ruang dialektika publik dalam memahami kompleksitas isu politik. Dengan demikian, kecenderungan framing yang lebih afirmatif ini tidak hanya menggambarkan sikap evaluatif media, tetapi juga memiliki implikasi terhadap pembentukan opini publik dan dinamika demokrasi lokal.

4. *Treatment Recommendation*

Sebanyak 50% dari total berita yang dianalisis menunjukkan kecenderungan memberikan rekomendasi yang mendukung kelanjutan maupun penguatan kebijakan yang telah berjalan. Rekomendasi tersebut umumnya muncul dalam bentuk penegasan perlunya optimalisasi program, peningkatan koordinasi, percepatan implementasi, atau perluasan cakupan kebijakan. Dengan demikian, solusi yang ditawarkan tidak mengarah pada perubahan arah kebijakan secara mendasar, melainkan pada penyempurnaan dan konsistensi pelaksanaan. Narasi semacam ini menempatkan kebijakan yang ada sebagai kerangka yang sudah tepat, sehingga yang dibutuhkan hanyalah penguatan komitmen dan efektivitas implementasi.

Sebaliknya, hanya sebagian kecil berita yang mendorong perubahan substansial atau evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan. Rekomendasi yang bersifat transformasional misalnya revisi regulasi, peninjauan ulang prioritas program, atau perubahan pendekatan strategis tidak menjadi arus utama dalam pemberitaan. Hal ini menunjukkan bahwa framing pada tahap *treatment recommendation* cenderung bersifat konservatif dan mempertahankan status quo kebijakan. Media lebih banyak memosisikan solusi sebagai perbaikan bertahap daripada reformulasi kebijakan secara fundamental.

Tabel 4. *Treatment Recommendation*

Jenis Rekomendasi	Jumlah Berita	Persentase
Mendukung Kelanjutan Kebijakan	14	50,0%
Perbaikan Teknis/Administratif	9	32,1%
Perubahan Kebijakan/Substansial	5	17,9%
Total	28	100%

Sumber: Data Penelitian, 2026

Dalam kerangka teori framing Robert N. Entman, tahap rekomendasi penyelesaian memiliki implikasi langsung terhadap arah opini publik. Ketika solusi yang ditonjolkan adalah penguatan kebijakan yang sudah ada, maka pembaca secara implisit diarahkan untuk menerima legitimasi kebijakan tersebut sebagai pilihan yang rasional dan layak dilanjutkan. Dengan kata lain, framing pada level rekomendasi tidak hanya menutup rangkaian narasi berita, tetapi juga memperkuat konstruksi makna bahwa stabilitas dan kontinuitas merupakan pilihan terbaik dalam dinamika politik lokal.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 28 berita politik yang dipublikasikan oleh Sumatera Pos, dapat diidentifikasi beberapa temuan utama yang konsisten dengan kerangka teori framing. Pertama, terdapat dominasi framing yang menekankan stabilitas dan keberhasilan pemerintah daerah dalam pemberitaan politik. Pola ini sejalan dengan temuan sebelumnya dalam kajian media lokal dan komunikasi politik yang menunjukkan bahwa media cenderung menonjolkan narasi stabilitas sebagai strategi untuk menjaga legitimasi institusional serta citra pemerintahan di mata publik (McQuail & Deuze, 2020). Pendekatan ini juga mengindikasikan preferensi media dalam menempatkan agenda pemberitaan pada isu-isu yang bersifat konstruktif dan proaktif, bukan konflik atau polarisasi.

Kedua, analisis menunjukkan bahwa penyebab masalah lebih sering diarahkan pada faktor teknis atau birokratis ketimbang kesalahan atau tanggung jawab aktor politik utama. Temuan ini konsisten dengan argumentasi Littlejohn, Foss, dan Oetzel (2017) bahwa media dalam menyajikan kritik sering kali mbingkainya dalam kategori yang bersifat administratif atau prosedural, sehingga kritik tidak diposisikan sebagai pertentangan langsung terhadap otoritas politik. Framing semacam ini cenderung mereduksi elemen konflik dan menempatkan persoalan dalam konteks yang lebih mudah dikelola oleh institusi.

Ketiga, analisis terhadap penilaian moral berita menunjukkan bahwa kecenderungan evaluasi normatif bersifat afirmatif terhadap pemerintah daerah. Sebagian besar berita menggunakan bahasa yang positif dan menunjukkan dukungan terhadap kebijakan atau tindakan pemerintah dalam narasi mereka. McQuail (2019) menegaskan bahwa penilaian moral dalam media merupakan salah satu mekanisme framing yang kuat dalam membentuk persepsi kebijakan publik karena media tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga memberi bobot evaluatif terhadap isu yang diberitakan. Hal ini turut mendukung terbentuknya interpretasi publik yang selaras dengan pesan-pesan yang memperkuat citra pemerintahan.

Keempat, pada tahap *treatment recommendation*, ditemukan bahwa solusi yang ditawarkan lebih banyak mendukung kelanjutan atau penguatan kebijakan yang sudah berjalan, ketimbang mendorong perubahan substansial. Strategi framing semacam ini mencerminkan kecenderungan media untuk mempertahankan status quo dan memberikan legitimasi terhadap arah kebijakan yang telah ditetapkan, sesuai dengan fenomena dalam literatur komunikasi politik yang menunjukkan media memiliki kecenderungan mempertahankan *policy continuity* (Entman, 2018).

Secara keseluruhan, pola framing yang diidentifikasi dalam pemberitaan politik media lokal ini menunjukkan representasi politik yang relatif stabil, moderat, dan tidak konfrontatif. Media cenderung menghindari framing yang bersifat tajam atau antagonistik terhadap pihak-pihak berwenang, melainkan memilih representasi yang menekankan kontinuitas kebijakan dan pengelolaan persoalan secara teknis. Temuan ini sejalan dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa dalam konteks media lokal, isu-isu politik sering kali dibingkai dalam narasi yang mempertahankan keharmonisan sosial dan legitimasi institusi (Strömbäck & Esser, 2017; Tandoc et al., 2021).

Jika dikaitkan dengan teori framing Robert N. Entman, media tidak sekadar menyampaikan fakta, melainkan melakukan proses seleksi, penonjolan (*saliency*), dan penekanan aspek tertentu dari realitas politik. Dalam formulasi klasiknya, Entman (1993) menjelaskan bahwa framing bekerja melalui empat perangkat utama: *define problems, diagnose causes, make moral judgments, dan suggest remedies*. Pada konteks ini, hasil analisis menunjukkan bahwa media tidak berdiri sebagai saluran netral, tetapi sebagai aktor yang secara aktif mengonstruksi makna politik melalui pilihan sudut pandang, narasumber, dan diksi yang digunakan.

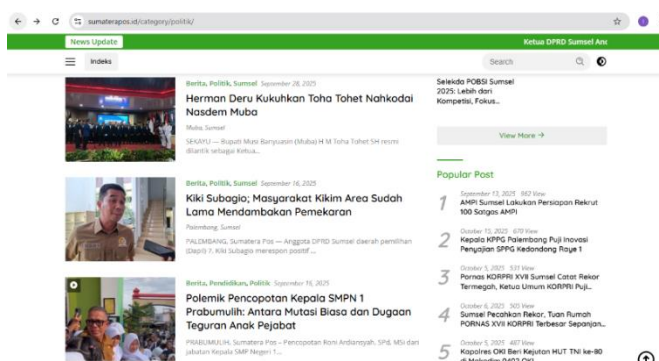
Temuan penelitian memperlihatkan bahwa *Sumatera Pos* cenderung:

- (1) Mendefinisikan politik lokal dalam bingkai stabilitas dan keberlanjutan pemerintahan,
- (2) Mengurangi penekanan pada konflik atau pertanggungjawaban aktor politik utama, serta
- (3) Memberikan legitimasi simbolik terhadap kebijakan pemerintah daerah melalui penilaian moral yang afirmatif dan rekomendasi yang mendukung kelanjutan program.

Dalam kerangka Entman, pola ini menunjukkan konsistensi antar-elemen framing dari

pendefinisian masalah hingga rekomendasi solusi yang saling menguatkan konstruksi realitas politik sebagai kondusif dan terkontrol.

Secara teoretis, praktik framing semacam ini sejalan dengan pandangan konstruktivis dalam studi komunikasi politik yang menempatkan media sebagai *meaning maker* dalam ruang publik. Literatur komunikasi politik kontemporer menegaskan bahwa media memiliki kapasitas untuk membentuk persepsi publik tentang legitimasi kekuasaan dan kinerja pemerintah melalui proses seleksi isu dan atribusi tanggung jawab (Blumler, 2016; Van Aelst & Walgrave, 2016). Dalam konteks lokal seperti Kota Palembang, konstruksi stabilitas yang dominan berpotensi membentuk opini publik yang melihat dinamika politik sebagai relatif harmonis, rasional, dan terkendali, sehingga memperkuat persepsi kepercayaan terhadap institusi pemerintahan daerah.



Gambar 3. Media Online Lokal Sumatera Pos
 Sumber: Data Penelitian, 2026

Namun demikian, dominasi framing yang afirmatif juga memiliki implikasi normatif dalam perspektif demokrasi lokal. Teori normatif pers menekankan bahwa media idealnya menjalankan fungsi *watchdog* dan kontrol sosial secara seimbang, bukan hanya sebagai saluran legitimasi kebijakan (McQuail, 2019; Voltmer, 2019). Ketika kritik terhadap kebijakan atau aktor politik tidak memperoleh proporsi pemberitaan yang memadai, ruang deliberasi publik berpotensi menyempit. Padahal, dalam sistem demokrasi yang sehat, keberagaman perspektif dan keberimbangan pemberitaan merupakan prasyarat bagi terbentuknya opini publik yang kritis dan partisipatif. Dengan demikian, dalam konteks komunikasi politik lokal di Kota Palembang, framing yang relatif stabil, moderat, dan tidak konfrontatif dapat dipahami sebagai strategi representasi yang menjaga citra kondusivitas politik. Akan tetapi, dari sudut pandang demokrasi deliberatif, penting untuk memastikan bahwa media tetap menyediakan ruang bagi artikulasi kritik dan perdebatan publik agar fungsi edukatif dan kontrol sosial media dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan analisis terhadap 28 berita politik, dapat disimpulkan bahwa media online lokal tersebut memainkan peran signifikan dalam membentuk konstruksi realitas politik di Kota Palembang melalui pola framing yang cenderung: *stability-oriented*, moderat, dan afirmatif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Pola ini tidak hanya terlihat pada cara isu didefinisikan, tetapi juga pada konsistensi antara penentuan penyebab, penilaian moral, hingga rekomendasi solusi yang sebagian besar mendukung keberlanjutan kebijakan yang telah berjalan. Orientasi pada stabilitas menunjukkan bahwa realitas politik lebih banyak direpresentasikan sebagai ruang tata kelola yang terkendali, progresif, dan minim konflik terbuka. Sikap moderat tampak

dari kecenderungan media menghindari atribusi kesalahan langsung kepada aktor politik utama serta lebih menekankan aspek teknis atau administratif dalam menjelaskan persoalan. Sementara itu, karakter afirmatif tercermin dalam dominasi narasi yang memberikan legitimasi simbolik terhadap kebijakan pemerintah daerah, baik melalui pilihan narasumber, diksi evaluatif, maupun struktur argumentasi berita.

Dalam perspektif teori framing, mekanisme ini memperlihatkan bagaimana media bekerja melalui proses seleksi isu (*issue selection*), penonjolan aspek tertentu (*saliency*), dan interpretasi makna yang terstruktur. Media tidak hanya menentukan apa yang diberitakan, tetapi juga bagaimana isu tersebut dipahami publik. Dengan demikian, temuan ini menjawab rumusan masalah penelitian bahwa peran media online dalam membentuk opini publik berlangsung melalui mekanisme seleksi, penekanan, dan interpretasi isu politik yang sistematis. Implikasinya, opini publik di tingkat lokal tidak terbentuk secara spontan, melainkan melalui proses konstruksi simbolik yang terus-menerus diproduksi dalam teks berita. Dalam konteks politik lokal Kota Palembang, pola framing yang stabilitas-oriented, moderat, dan afirmatif berpotensi memperkuat persepsi publik terhadap legitimasi dan keberlanjutan pemerintahan daerah. Namun pada saat yang sama, dinamika ini juga menegaskan pentingnya keseimbangan pemberitaan agar ruang deliberasi publik tetap terjaga sebagai bagian dari praktik demokrasi lokal yang sehat.

Berdasarkan keseluruhan proses analisis terhadap 28 berita politik yang diteliti, dapat disimpulkan bahwa target penelitian telah tercapai sesuai dengan tujuan yang dirumuskan, yaitu mengidentifikasi dan menganalisis pola framing media online lokal dalam membentuk konstruksi realitas politik di Kota Palembang. Melalui penerapan analisis framing model Robert N. Entman, penelitian ini mampu memetakan secara sistematis bagaimana media mendefinisikan masalah, menentukan penyebab, memberikan penilaian moral, serta merekomendasikan solusi atas isu politik lokal. Dari hasil analisis tersebut, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa media online berperan aktif dalam membentuk opini publik melalui mekanisme seleksi, penekanan, dan interpretasi isu politik terkonfirmasi. Pola framing yang ditemukan menunjukkan kecenderungan stabilitas-oriented, moderat, dan afirmatif terhadap kebijakan pemerintah daerah. Politik lokal lebih banyak direpresentasikan sebagai ruang yang kondusif, terkelola, dan progresif, dengan minimnya penekanan pada konflik aktor utama maupun kritik substantif terhadap kebijakan. Secara metodologis, terdapat ketepatan antara persoalan, kebutuhan penelitian, dan metode yang diterapkan. Permasalahan penelitian berfokus pada konstruksi realitas politik dalam pemberitaan media online, sehingga pendekatan kualitatif dengan analisis framing dinilai relevan dan memadai untuk mengungkap struktur makna di balik teks berita. Metode ini memungkinkan peneliti mengidentifikasi pola representasi yang tidak selalu tampak secara eksplisit, namun bekerja melalui penekanan dan pengulangan narasi tertentu. Implikasi dari hasil penelitian ini bersifat teoritis dan praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi teori framing dalam kajian komunikasi politik lokal, khususnya dalam menjelaskan bagaimana media membangun legitimasi simbolik terhadap kekuasaan. Secara praktis, temuan ini memberikan gambaran bagi pengelola media, akademisi, dan pemangku kepentingan di daerah mengenai pentingnya keseimbangan framing dalam menjaga kualitas demokrasi lokal. Dominasi framing afirmatif memang dapat memperkuat persepsi stabilitas, namun tetap perlu diimbangi dengan ruang kritik yang proporsional agar fungsi kontrol sosial media tetap berjalan optimal.



Gambar 4. Media Online Lokal Sumatera Pos
Sumber: Data Penelitian, 2026

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, media online lokal diharapkan dapat meningkatkan prinsip keberimbangan dan keberagaman perspektif dalam pemberitaan politik. Meskipun framing yang stabil dan moderat berkontribusi pada terciptanya persepsi kondusif di ruang publik, media tetap perlu memberikan ruang yang proporsional bagi kritik, evaluasi kebijakan, serta suara alternatif dari berbagai kelompok masyarakat. Hal ini penting untuk menjaga fungsi kontrol sosial media dan memastikan proses demokrasi lokal berlangsung secara sehat dan deliberatif. Bagi pemerintah daerah, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi untuk terus membangun komunikasi publik yang transparan dan akuntabel tanpa mengintervensi independensi media. Hubungan yang profesional antara pemerintah dan media akan mendorong terciptanya arus informasi yang lebih terbuka, sehingga kepercayaan publik tidak hanya dibangun melalui citra stabilitas, tetapi juga melalui praktik tata kelola yang partisipatif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Sementara itu, bagi kalangan akademisi dan peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan memperluas cakupan media, periode waktu, maupun pendekatan metodologis agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai dinamika framing politik lokal. Di sisi lain, masyarakat sebagai konsumen media juga perlu meningkatkan literasi media agar mampu memahami bahwa setiap pemberitaan mengandung proses seleksi dan penekanan tertentu. Dengan demikian, publik dapat membangun sikap kritis dalam menyikapi informasi politik dan berpartisipasi secara lebih sadar dalam kehidupan demokrasi lokal.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa tujuan penelitian telah tercapai, yaitu mengidentifikasi pola framing media online lokal dalam membentuk konstruksi realitas politik di Kota Palembang dengan menggunakan model analisis framing dari Robert N. Entman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media berperan aktif dalam membentuk opini publik melalui seleksi, penekanan, dan interpretasi isu politik. Pola framing yang dominan cenderung berorientasi pada stabilitas, bersifat moderat, dan afirmatif terhadap kebijakan pemerintah daerah, dengan minimnya penekanan pada konflik maupun kritik substantif.

Secara metodologis, pendekatan kualitatif dengan analisis framing dinilai tepat, serta secara teoritis memperkuat relevansi teori framing dalam kajian komunikasi politik lokal. Secara praktis, temuan ini menegaskan pentingnya keberimbangan pemberitaan bagi kualitas

demokrasi. Sebagai saran, penelitian lanjutan perlu dilakukan secara komparatif dengan mengkaji sumber berita politik dari surat kabar lokal lain selain *Sumatera Pos*, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif. Selain itu, penelitian berikutnya juga disarankan memperluas objek, periode, dan pendekatan metodologis agar hasil penelitian semakin kaya dan mendalam.

DAFTAR PUSTAKA

- Blumler, J. G. (2016). The fourth age of political communication. *Política & Sociedad*, 15(32), 19–30. <https://doi.org/10.5007/2175-7984.2016v15n32p19>
- Brüggemann, M. (2014). Between frame setting and frame sending: How journalists contribute to news frames. *Communication Theory*, 24(1), 61–82. <https://doi.org/10.1111/comt.12027>
- Cinelli, M., Morales, G. D. F., Galeazzi, A., Quattrociocchi, W., & Starnini, M. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Cinelli, M., Quattrociocchi, W., Galeazzi, A., Valensise, C. M., Brugnoli, E., Schmidt, A. L., Zola, P., Zollo, F., & Scala, A. (2021). The echo chamber effect on social media. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 118(9), e2023301118. <https://doi.org/10.1073/pnas.2023301118>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). Sage Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- De Vreese, C. H. (2017). Effects of news media framing on public opinion and political behavior. *Oxford Research Encyclopedia of Communication*. <https://doi.org/10.1093/acrefore/9780190228613.013.437>
- Entman, R. M. (2018). Cascading activation: Contesting the White House’s frame after 9/11. *Political Communication*, 35(4), 556–574. <https://doi.org/10.1080/10584609.2018.1493009>
- Entman, R. M. (2018). Framing in a fractured democracy: Impacts of digital technology on ideology, power and cascading network activation. *Journal of Communication*, 68(2), 298–308. <https://doi.org/10.1093/joc/jqx019>
- Eriyanto. (2018). *Analisis framing: Konstruksi, ideologi, dan politik media* (Edisi terbaru). LKiS.
- Feezell, J. T. (2018). Agenda setting through social media: The importance of incidental news exposure and social filtering in the digital era. *Political Research Quarterly*, 71(2), 482–494. <https://doi.org/10.1177/1065912917744895>
- Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2018). *Are people incidentally exposed to news on social media? A comparative analysis*. *New Media & Society*, 20(7), 2450–2468. <https://doi.org/10.1177/1461444817724170>
- Fletcher, R., & Nielsen, R. K. (2018). *Automated serendipity: The effect of using search engines on news repertoire balance and diversity*. *Digital Journalism*, 6(8), 976–989. <https://doi.org/10.1080/21670811.2018.1502045>
- Guo, L., & Vargo, C. J. (2017). Global intermedia agenda setting: A big data analysis of international news flow. *Journal of Communication*, 67(4), 499–520. <https://doi.org/10.1111/jcom.12314>
- H. D. L. Ati, I. Putri, and D. Dendi, “Media Sosial Sebagai Transformasi Digital Media Relation Dan Digital Marketing Umkm,” *J. Media Public Relations*, vol. 5, no. 1, pp. 48–57.
- Harder, R. A., Sevenans, J., & Van Aelst, P. (2017). Intermedia agenda setting in the social media age: How traditional players dominate the news agenda in election times. *The*

- International Journal of Press/Politics*, 22(3), 275–293.
<https://doi.org/10.1177/1940161217704969>
- I. Putri, “Implementation of Social Media Marketing By Culinary Msmes,” *J. Public Relations Digit. Commun.*, vol. 2, no. 2, pp. 114–123, 2024, doi: 10.24967/jprdc.v2i2.3594.
- I. Putri, A. I. Mulyadi, S. D. Fajarin, and R. Eriyansyah, “Transformasi Digital Umkm Kota Palembang,” *J. Ilmu Komun. Balayudha*, vol. Vol 3 No.1, no. 1, pp. 28–40, 2023.
- I. Putri, N. Syukerti, A. I. Mulyadi, and D. Dendi, “Implementation Of Palembang City Government Programs In Digital Marketing Transformation And Halal Certification,” *KOMUNIKA*, vol. 7, no. 1, 2024.
- Lecheler, S., & de Vreese, C. H. (2019). *News framing effects*. Routledge.
- Littlejohn, S. W., & Foss, K. A. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- Littlejohn, S. W., Foss, K. A., & Oetzel, J. G. (2017). *Theories of human communication* (11th ed.). Waveland Press.
- McCombs, M. (2018). *Setting the agenda: Mass media and public opinion* (2nd ed.). Polity Press.
- McQuail, D. (2019). *Media and mass communication theory* (7th ed.). Sage Publications.
- McQuail, D., & Deuze, M. (2020). *McQuail's media and mass communication theory* (7th ed.). Sage Publications.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). Sage Publications.
- Neuman, W. L. (2017). *Social research methods: Qualitative and quantitative approaches* (7th ed.). Pearson.
- Neuman, W. R., Guggenheim, L., Mo Jang, S., & Bae, S. Y. (2016). The dynamics of public attention: Agenda-setting theory meets big data. *Journal of Communication*, 66(5), 766–788. <https://doi.org/10.1111/jcom.12252>
- Newman, N., Fletcher, R., Eddy, K., Robertson, C. T., & Nielsen, R. K. (2023). *Digital news report 2023*. Reuters Institute for the Study of Journalism. <https://www.digitalnewsreport.org>
- Putri, I., Dendi, Mulyadi, A. I., Adli, & Triesia, D. (2024). *Implementasi fotografi produk dengan menggunakan kamera smartphone bagi pelaku UMKM*. *Jurnal Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (JP2M)*, 5(2), 373–382. <https://doi.org/10.33474/jp2m.v5i2.21843>
- Rogers, E. M., & Dearing, J. W. (2017). Agenda-setting research: Where has it been, where is it going? *Annals of the International Communication Association*, 41(1), 3–20. <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288552>
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). Sage Publications.
- Schäfer, M. S., & Zürn, M. (2021). Trust in science in polarized societies. *Public Understanding of Science*, 30(2), 145–150. <https://doi.org/10.1177/0963662521992970>
- Schreier, M. (2012). *Qualitative content analysis in practice*. Sage Publications.
- Shehata, A., & Strömbäck, J. (2021). Learning political news from social media: Network media logic and agenda setting. *New Media & Society*, 23(6), 1304–1322. <https://doi.org/10.1177/1461444820905049>
- Sobur, A. (2016). *Analisis teks media: Suatu pengantar untuk analisis wacana, analisis semiotik, dan analisis framing*. Remaja Rosdakarya.
- Strömbäck, J., & Esser, F. (2017). *Political public relations and mediatization: The strategies of news management*. *Journalism Studies*, 18(3), 1–17. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2015.1048192>
- Strömbäck, J., & Esser, F. (2017). *Political public relations and mediatization: The strategies of news management*. *International Journal of Press/Politics*, 22(3), 278–296. <https://doi.org/10.1177/1940161217707469>
- Strömbäck, J., & Esser, F. (Eds.). (2014). *Mediatization of politics: Understanding the transformation of Western democracies*. Palgrave Macmillan.

- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Tandoc, E. C., Jr., & Duffy, A. (2016). *The agenda-setting power of social media: A comparative analysis of news values and online attention*. *Journalism Practice*, 10(4), 1–17. <https://doi.org/10.1080/17512786.2015.1017408>
- Tandoc, E. C., Jr., Thomas, R. J., & Bishop, L. (2021). *What is (fake) news? Analyzing news values in misinformation*. *Digital Journalism*, 9(2), 146–164. <https://doi.org/10.1080/21670811.2020.1847672>
- Tandoc, E. C., Thomas, R. J., & Bishop, L. (2021). *What is (fake) news? Analyzing news values in social media news consumption*. *Journalism Studies*, 22(2), 146–164. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2020.1847645>
- Usher, N. (2021). *News for the rich, white, and blue: How place and power distort American journalism*. Columbia University Press.
- Van Aelst, P., & Walgrave, S. (2016). *Information and arena: The dual function of the news media for political elites*. *Journal of Communication*, 66(3), 496–518. <https://doi.org/10.1111/jcom.12229>
- Van Aelst, P., Strömbäck, J., Aalberg, T., Esser, F., de Vreese, C., Matthes, J., Hopmann, D. N., Salgado, S., Hubé, N., Stępińska, A., Papathanassopoulos, S., Berganza, R., Legnante, G., Reinemann, C., Sheaffer, T., & Stanyer, J. (2017). *Political communication in a high-choice media environment: A challenge for democracy?* *Annals of the International Communication Association*, 41(1), 3–27. <https://doi.org/10.1080/23808985.2017.1288551>
- Voltmer, K. (2019). *Media, communication and politics in democratic transition*. Routledge.
- Von Sikorski, C. (2020). *The effects of political scandal framing on public opinion*. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 97(2), 377–399. <https://doi.org/10.1177/1077699019869966>
- Vos, T. P., & Heinderyckx, F. (2015). *Gatekeeping in transition*. *Journalism Studies*, 16(5), 661–670. <https://doi.org/10.1080/1461670X.2015.1055544>
- Waisbord, S. (2020). *Fake news: Understanding media and misinformation in the digital age*. Polity Press.
- Wettstein, M., Wirz, D. S., & Engelke, K. M. (2018). *News media as gatekeepers, watchdogs, and amplifiers of populist messages*. *Journalism & Mass Communication Quarterly*, 95(2), 452–472. <https://doi.org/10.1177/1077699018756983>
- Wimmer, R. D., & Dominick, J. R. (2014). *Mass media research: An introduction* (10th ed.). Cengage Learning.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). Sage Publications.